

Kadis PTSP La Ganefo Dorong Pengawasan Terpadu PBG Lintas Instansi untuk Optimalkan PAD Buton Selatan



01

Pelayanan di PTSP tetap normal dan berjalan dengan baik.

Kebutuhan masyarakat tetap dilayani meski ada beberapa jabatan yang masih kosong.

02

Izin praktik tenaga kesehatan paling banyak diajukan.

Seperti bidan, apoteker dan dokter. Jika dokumen lengkap, proses bisa selesai dalam satu hari.

03

Layanan perizinan sudah menggunakan sistem online.

Perizinan badan usaha dan pangkalan minyak sudah online, sementara izin praktik dokter masih manual.

04

Peningkatan PAD belum maksimal.

Salah satu kendala utama adalah rendahnya kepatuhan masyarakat dalam mengurus PBG sebelum membangun.

05

Pengawasan perlu kolaborasi lintas instansi.

PTSP, Satpol PP, Dinas Pendapatan, Dinas Perumahan dan Dinas Lingkungan Hidup turun bersama ke lapangan.

06

Aktivitas tambang galian C juga menjadi perhatian.

Perlu pengawasan dampak lingkungan meski kewenangan izin berada di provinsi.

Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Selatan belum berjalan maksimal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Busel mendorong pengawasan lintas instansi terhadap pembangunan gedung dan aktivitas usaha, terutama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kepala Dinas PTSP Buton Selatan Drs La Ganefo MH mengatakan peningkatan PAD tidak cukup men-

gandakan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), perangkat daerah yang menangani pendapatan, serta instansi yang

membidangi perumahan dan lingkungan hidup agar pengawasan dapat dilakukan langsung di lapangan.

“Target peningkatan PAD itu belum maksimal. Kita perlu kolaborasi dengan instansi terkait, bukan hanya sosialisasi, tetapi juga turun bersama ke lapangan,” kata La Ganefo, Kamis, 15

Oktober 2026

Ia pun menyoroti masih adanya bangunan yang memanfaatkan bahu jalan dan berpotensi melanggar ketentuan garis sempadan. Menurut dia, pengawasan diperlukan untuk memastikan pembangunan berlangsung sesuai aturan serta tidak mengganggu kepentingan umum. PTSP, kata dia, telah membicarakan rencana koordinasi dengan Kepala Dinas Satpol PP untuk mem-

Lanjut ke Hal: 7

Anggota DPR RI Fraksi NasDem Ali Mazi Salurkan Rp2,49 Miliar untuk Pendidikan dan Bedah Rumah di Kabupaten Buton



Anggota DPR RI Fraksi NasDem Ali Mazi Salurkan Rp2,49 Miliar untuk Pendidikan dan Bedah Rumah di Kabupaten Buton

KORAN BAUBAU POST

Laporan: Firman

BUTON, BP- Sebanyak 355 siswa dan 116 keluarga di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, menerima bantuan pendidikan melalui Program In-

donesia Pintar (PIP) dan program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan total nilai mencapai Rp2,49 miliar. Bantuan yang diserahkan Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem,

H. Ali Mazi, S.H., di Pasarwajo, Minggu (11/10/2026), itu ditujukan untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kelayakan hunian masyarakat.

Bantuan tersebut

terdiri atas Rp171,75 juta untuk siswa dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas serta Rp2,32 miliar untuk perbaikan 116 unit rumah. Pener-

Lanjut ke Hal: 7

Kendalikan Inflasi Pangan, Buton Tengah dan Baubau Perkuat Sinergi Antar Daerah



Laporan: Firman

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menjajaki kerja sama antardaerah dengan Pemerintah Kota Baubau untuk memperkuat pasokan pangan dan menjaga stabilitas harga sebagai bagian dari upaya

pengendalian inflasi di kawasan Kepulauan Buton. Pembahasan tersebut dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Buton Tengah di Ruang Rapat Kyjula Lantai V Kantor Bupati Buton Tengah, Rabu

Lanjut ke Hal: 7

Empat Hari Digelar, Baubau Job Fair 2026 Catat 596 Lamaran dari 528 Pencari Kerja, 551 Akses Bansos dan 249 Pemeriksaan Kesehatan, Amalia Abibu Apresiasi Partisipasi Warga



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Baubau Job Fair 2026 menghimpun 596 berkas lamaran dari 528 pencari kerja yang melakukan registrasi selama empat hari pelaksanaan, 12-15 Oktober 2026. Ke-

giatan yang digelar di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kota Baubau itu tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga mengintegrasikan

Lanjut ke Hal: 7

Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Takjub, Karnaval Budaya Malam Hari Dipadati Ribuan Warga, Pemkot Benahi Pelaksanaan Tahun Depan



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Ribuan warga memadati jalur Karnaval Budaya Kota Baubau, Selasa malam (13/10/2026), dalam

rangka peringatan HUT Baubau ke-485 dan Hari Jadi Kota Baubau ke-25 sebagai daerah otonom. Digelar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya

ya yang berlangsung pada siang hari, karnaval malam itu menghadirkan pertunjukan budaya sekaligus menjadi momentum bagi

Lanjut ke Hal: 7

PDIP Siapkan Pemecatan Bupati Klaten Hamenang Usai Ditetapkan sebagai Tersangka



Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun mengatakan segera memecat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo atas dugaan kasus korupsi yang menyeretnya.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyiapkan pemecatan tidak dengan hormat terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi. Surat rekomendasi pemecatan tersebut dijadwalkan diterbitkan pada Senin, 19 Oktober 2026, sebagai bentuk penegakan disiplin internal partai.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, menyampaikan rencana tersebut melalui keterangan resmi pada Sabtu (17/10/2026). Ia menegaskan, partai tidak akan memberikan toleransi kepada kader yang terbukti melakukan korupsi, baik yang bertugas di lingkungan eksekutif maupun legislatif.

“Untuk itu, kami lagi proses pemecatan. Hari Senin besok, kami pecat. Hari Senin kami akan keluaran surat rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat ke yang bersangkutan,” kata Komarudin.

Menurut Komarudin, partai sebelumnya telah mengingatkan

para kepala daerah agar menjaga integritas dan menghindari penyalahgunaan jabatan. Pada 14 September 2026, ia memanggil sejumlah kepala daerah, termasuk Hamenang, ke kantor DPP PDIP untuk kembali menyampaikan peringatan tersebut.

Komarudin menilai pejabat publik semestinya mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan pribadi melalui tindakan melanggar hukum. Ia juga menyatakan penyesalannya atas perkara yang menjerat Hamenang, mengingat partai mengaku telah berulang kali mengingatkan kadernya mengenai bahaya korupsi.

Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan seorang pihak swasta. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, termasuk dugaan pemberian kepada pihak BPK untuk mengondisikan audit.

KPK mengungkap lima kluster dugaan korupsi yang meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta pemberian kepada pihak BPK yang diduga berkaitan dengan pengondisian pemeriksaan.

Dalam penguatan kasus tersebut, penyidik KPK menyita uang senilai Rp934 juta yang disimpan di dalam sebuah tong berwarna biru. Tong itu ditemukan di kediaman Hanaku Agni Sadewo, adik Hamenang. Uang tersebut menjadi salah satu barang bukti yang didalami penyidik dalam rangkaian penanganan perkara.

Kasus ini menambah catatan penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah di Indonesia. Secara historis, pemerintah telah membentuk berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi, mulai dari Peraturan Penguasa Perang Pusat pada 1957, Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960, hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Pada era Reformasi, kerangka hukum

diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pembentukan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat penegakan hukum antikorupsi. Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi PBB Menentang Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada 2003. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 sebagai bagian dari kerja sama internasional dalam pencegahan korupsi, penegakan hukum, dan pemulihan aset.

Rencana pemecatan Hamenang merupakan proses internal partai yang terpisah dari penyidikan KPK. Status tersangka tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah dinyatakan bersalah. Pembuktian tindak pidana dan penentuan hukuman tetap dilakukan melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)

Golkar Pertanyakan Isu Pemilu Tiga Tahap, Draf RUU Belum Rampung

Laporan: Radit

M A K A S - SAR, BP- Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu belum rampung di tengah beredarnya isu mengenai kemungkinan penyelenggaraan pemilu dalam tiga tahap. Golkar kini menyerap aspirasi anggota DPRD untuk merumuskan usulan revisi regulasi pemilu, termasuk ambang batas parlemen sekitar 5 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji di Makassar, Sabtu (17/10/2026). Ia mengaku belum mengetahui sumber informasi mengenai skema pemilu tiga tahap karena belum ada draf RUU Pemilu yang selesai disusun.

“Sampai sekarang belum ada RUU Pemilu. Jadi, yang beredar itu enggak tahu RUU dari mana. Tapi, draf RUU Pemilu belum ada sampai sekarang, belum jadi,” kata Sarmuji.

Di internal Golkar, pembahasan revisi UU Pemilu masih berada pada tahap jaringan aspirasi. Partai tersebut menghimpun masukan dari anggota DPRD mengenai sejumlah ketentuan yang dinilai perlu diperjuangkan dalam perubahan regulasi pemilu mendatang.

Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah parliametary threshold atau ambang batas parlemen. Golkar mempertimbangkan angka sekitar 5 persen, meski-

pun besaran akhir yang akan diajukan masih dapat disesuaikan.

“PT kita akan usulkan sekitar 5 persen, bisa 5 persen persis atau 5 persen lebih sedikit,” ujar Sarmuji.

Pembahasan regulasi tersebut, menurut Sarmuji, tidak semata-mata diarahkan untuk memenuhi kepentingan elektoral partai. Golkar juga menginginkan perubahan aturan yang dapat memperbaiki penyelenggaraan demokrasi dan memberikan manfaat bagi bangsa.

Meski demikian, peningkatan perolehan kursi legislatif tetap menjadi sasaran politik Golkar pada pemilu berikutnya. Partai itu bertekad memperoleh lebih banyak kursi dibandingkan hasil Pemilu 2024, meskipun belum menetapkan angka kenaikan secara spesifik.

“Orientasi kita nambah kursi. Entah kursi tambahannya berapa, kita akan berusaha nambah kursi. Yang harus dipastikan adalah nambah kursi dari tahun 2024 kemarin,” ungkapnya.

Sarmuji menilai penambahan kursi merupakan target yang harus diperjuangkan partainya. Kegagalan meningkatkan perolehan kursi, menurut dia, akan mencerminkan kegagalan dalam menjalankan tugas politik yang telah ditetapkan.

Terkait peluang kader Golkar yang saat ini mendu-

ki jabatan di kabinet untuk mengikuti pemilihan anggota legislatif, Sarmuji menyatakan seluruh kader memiliki kesempatan menjadi calon anggota legislatif. Ia juga menyebut Ketua Umum Golkar akan maju sebagai caleg di Papua.

Wacana perubahan sistem pemilu tersebut berada dalam konteks evaluasi berkelanjutan terhadap tata kelola demokrasi Indonesia. Sejak reformasi 1998, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara langsung pada 2004. Pada 2019, pemilu nasional diselenggarakan secara serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota lembaga legislatif, sebuah model yang kembali diterapkan pada 2024.

Di tingkat internasional, desain jadwal pemilu juga beragam. Sejumlah negara memisahkan pemilihan presiden dan parlemen, sedangkan negara lain menyelenggarakannya secara bersamaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penentuan tahapan pemilu bergantung pada sistem ketatanegaraan dan pilihan kebijakan masing-masing negara. Karena itu, isu pemilu tiga tahap di Indonesia masih perlu ditelusuri dasar usulan dan mekanisme hukumnya sebelum dapat dinilai sebagai rancangan kebijakan resmi. (*)

PPDB 2027 Sekolah Garuda Konawe Selatan, Peluang Siswa Sultra Masuk Sekolah Unggul



Laporan: Mashuri

KONAWE SELATAN, BP- SMA Unggul Garuda Baru (SUGB) Konawe Selatan mulai memperluas sosialisasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2027 dengan mengajak siswa SMP dan madrasah tsanawiyah (MTs) di Sulawesi Tenggara memanfaatkan kesempatan menempuh pendidikan di sekolah unggulan tersebut. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan Gelar Griya (Open House) di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sabtu (17/10/2026).

Kepala SMA Unggul Garuda Konawe Selatan, Dian Anggraini, melaporkan bahwa sekolah yang berdiri di atas lahan sekitar 20 hektare itu telah menerima 76 peserta didik pada angkatan pertama. Mereka berasal dari Sulawesi Tenggara dan sejumlah provinsi lain di Indonesia. Kegiatan pembelajaran dimulai pada Juli 2026, bertepatan dengan tahun ajaran 2026/2027, setelah pembangunan sekolah diawali dengan peletakan batu pertama pada Oktober 2025.

Dari sisi infrastruktur, progres pembangunan fisik sekolah telah mencapai sekitar 89 persen. Fasilitas yang diperkenalkan kepada para tamu meliputi ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, asrama, gedung serbaguna, serta sarana pendukung pendidikan lainnya. Sejak beroperasi, sekolah juga menjalankan kegiatan akademik, pembinaan kedisiplinan, dan pengembangan minat serta bakat peserta didik.

Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, M.A., M.Sc., Ph.D., mengatakan, sebanyak 55 SMP/MTs diundang untuk

mengenal langsung lingkungan dan sistem pendidikan SMA Unggul Garuda Konawe Selatan. "Harapannya, sekolah-sekolah tersebut dapat mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk mendaftar, terutama dari Sulawesi Tenggara," ujarnya.

Kegiatan bertema Satu Tahun Sekolah Garuda Melahirkan Talenta Unggul untuk Indonesia itu dilaksanakan serentak di 51 sekolah dalam ekosistem Sekolah Garuda di seluruh Indonesia. Jaringan tersebut terdiri atas empat SMA Unggul Garuda Baru dan 47 SMA Unggul Garuda Transformasi. Selain menyosialisasikan PPDB 2027, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan fasilitas, program pembelajaran, perkembangan pembangunan, dan capaian pendidikan kepada masyarakat.

Ahmad Najib menjelaskan, pengenalan langsung kepada calon peserta didik, kepala sekolah, guru, dan orang tua diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran mengenai kualitas lingkungan belajar serta program yang ditawarkan. Menurut dia, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk pertanggungjawaban publik atas pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan pendidikan selama satu tahun.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lembaga Pengelola Universitas dan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia (LPUPK-RI), Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan T., M.D.S., M.S.P., menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Program Sekolah Rakyat, Sekolah Nasional Terintegrasi, dan

Sekolah Unggul Garuda, menurut dia, merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas.

Donny menegaskan, keunggulan generasi muda tidak cukup diukur melalui prestasi akademik. "Generasi unggul tidak cukup hanya memiliki kecerdasan akademik. Mereka juga harus mempunyai karakter yang baik, integritas, nasionalisme, serta kecintaan terhadap tanah air," katanya. Nilai-nilai tersebut dinilai penting agar generasi muda mampu menghadapi persaingan global tanpa kehilangan identitas kebangsaan.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Muhammad Fadlansyah, menyebut kehadiran SMA Unggul Garuda sebagai langkah strategis memperkuat kualitas sumber daya manusia di daerah. Pemerintah provinsi menyambut baik pembangunan sekolah tersebut sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan.

Menurut sambutan gubernur, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kecerdasan buatan, dan persaingan global menuntut sistem pendidikan yang tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga kreativitas, integritas, kedisiplinan, serta semangat pengabdian. SMA Unggul Garuda Konawe Selatan diharapkan menjadi ruang pengembangan kemampuan berpikir kritis, budaya riset, dan inovasi, terutama dalam bidang sains dan teknologi.

Pengelolaan Sekolah Garuda juga direncanakan beralih secara bertahap dari Kementerian Pendi-

dikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kepada LPUPK-RI. Transisi tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dan pengembangan talenta unggul nasional melalui ekosistem pendidikan yang lebih terintegrasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan Sulawesi Tenggara sebagai salah satu lokasi pembangunan Sekolah Unggul Garuda.

Secara historis, pengembangan sekolah unggulan sejalan dengan upaya berbagai negara membangun sumber daya manusia melalui pendidikan sains, teknologi, riset, dan inovasi. Secara internasional, perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan mendorong negara-negara memperkuat kualitas pendidikan menengah sebagai fondasi menuju perguruan tinggi dan dunia penelitian. Di Indonesia, penguatan pendidikan sains dan teknologi juga menjadi bagian penting dari agenda peningkatan daya saing nasional. Dalam konteks itu, keberadaan SMA Unggul Garuda Konawe Selatan diharapkan memperluas kesempatan generasi muda Sulawesi Tenggara untuk mengembangkan potensi akademik dan berkontribusi bagi pembangunan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap capaian satu tahun pembangunan dan penyelenggaraan SMA Unggul Garuda menjadi pijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Dengan fasilitas yang terus dikembangkan, pembinaan karakter, dan penguatan pembelajaran sains serta teknologi, sekolah tersebut diharapkan mampu melahirkan talenta unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. (*)

Kabut Asap Melanda Sultra, Pemprov Perluas Pengukuran Kualitas Udara di Lima Daerah

Laporan: Lisna

S U L T R A , BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) memperluas pengukuran kualitas udara ke sejumlah kabupaten untuk memetakan kondisi pencemaran di tengah kabut asap yang melanda beberapa wilayah. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pemerintah mengukur kualitas udara secara langsung di lapangan dan melanjutkan pemantauan ke lima kabupaten.

Data Air Quality Monitoring System (AQMS) di stasiun Kendari menunjukkan konsentrasi partikulat PM10 dan PM2.5 sama-sama mencapai angka 36 pada 15 Oktober 2026. Meski masih berada di bawah ambang batas baku mutu udara ambien yang dicantumkan dalam laporan, perkembangan tersebut menjadi bagian dari pemantauan kualitas udara di tengah kondisi kabut asap.

Kepala DLH Provinsi Sultra La Ode Muhammad Ali Haswandy, S.E., M.Si., memimpin pengukuran bersama Tim Laboratorium Lingkungan DLH Sultra di Kabupaten Bombana dan Konawe Selatan pada Kamis (15/10/2026). Pengukuran berikutnya dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Konawe, Konawe Utara, dan Kolaka.

Ali Haswandy menjelaskan, pengukuran langsung diperlukan untuk memperoleh data faktual mengenai

kualitas udara, terutama di daerah yang terdampak kabut asap. "Pengukuran ini dilakukan untuk memperoleh data kualitas udara secara langsung di lapangan, khususnya pada wilayah yang terdampak kabut asap," demikian penjelasan kegiatan tersebut berdasarkan keterangan yang disampaikan.

Berdasarkan laporan AQMS periode 11-15 Oktober 2026, konsentrasi PM10 di Kendari berfluktuasi. Nilainya tercatat 21 pada 11 Oktober, naik menjadi 25 pada 12 Oktober dan 33 pada 13 Oktober, kemudian turun menjadi 10 pada 14 Oktober sebelum meningkat menjadi 36 pada 15 Oktober.

Pola berbeda terlihat pada PM2.5. Konsentrasinya mencapai 33 pada 11 Oktober, turun menjadi 11 pada 12 Oktober, lalu meningkat menjadi 15 pada 13 Oktober, 18 pada 14 Oktober, dan 36 pada 15 Oktober 2026.

Dalam laporan tersebut, ambang batas yang dicantumkan adalah 75 untuk PM10 dan 55 untuk PM2.5. Dengan demikian, angka 36 pada kedua parameter masih berada di bawah ambang batas yang digunakan dalam laporan. Namun, data dari stasiun Kendari tidak dapat langsung mewakili kondisi udara di seluruh kabupaten di Sultra.

Pemantauan partikulat penting karena PM10 dan PM2.5 merupa-

kan partikel udara dengan ukuran berbeda yang dapat masuk ke saluran pernapasan. Partikel PM2.5 berukuran lebih kecil dan dapat menembus lebih jauh ke dalam paru-paru. Karena itu, pengukuran berbasis instrumen diperlukan untuk melengkapi pengamatan visual terhadap kabut asap.

Secara historis, kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap telah menjadi persoalan lingkungan lintas wilayah di Indonesia, terutama saat kondisi cuaca kering berkepanjangan. Pada tingkat internasional, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan pedoman kualitas udara global pada 2021 yang memperketat rekomendasi paparan partikulat, termasuk PM2.5 dan PM10. Pedoman tersebut menegaskan pentingnya pemantauan polusi udara untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Perlunya pengukuran di Sultra menjadi langkah untuk memperoleh gambaran kualitas udara yang lebih menyeluruh. Hasil pemeriksaan dari Bombana, Konawe Selatan, Konawe, Konawe Utara, dan Kolaka diharapkan dapat membantu pemerintah menilai kondisi udara berdasarkan data lapangan, dengan tetap membedakan hasil pengukuran setiap lokasi. (*)

Bupati Azhari Dorong SNT 15 Buton Tengah Cetak Generasi Muda Berdaya Saing Global



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerataan pendidikan berkualitas hingga wilayah pelosok dan kepulauan menjadi salah satu sasaran pengembangan SNT 15 Buton Tengah. Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, berharap sekolah rintisan yang baru beroperasi sekitar dua bulan itu berkembang menjadi pusat pendidikan unggul sekaligus mercusuar pembangunan sumber daya manusia di kawasan tengah Indonesia.

Harapan tersebut disampaikan Azhari saat menghadiri kegiatan Open House SNT 15 Buton Tengah di Kampus B Universitas Sembilanbelas November (USN) Buton Tengah, Mawasangka, Jumat (16/10/2026). Kegiatan itu menjadi kesempatan untuk melihat perkembangan sekolah dan antusiasme peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.

Azhari menegaskan, akses terhadap pendidikan bermutu tidak semestinya hanya dinikmati anak-anak yang tinggal di perkotaan. Menurut dia, peserta didik dari wilayah pelosok dan kepulauan juga harus memperoleh kesempatan belajar yang memadai tanpa harus

meninggalkan daerah asal atau menempuh perjalanan jauh.

“Keberadaan SNT 15 Buton Tengah diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pendidikan bermutu, sehingga anak-anak di daerah juga memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkompetisi,” demikian harapan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Ia mendorong peserta didik memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kemampuan akademik, serta membangun kesiapan menghadapi persaingan di tingkat nasional dan global. Pengembangan sekolah, menurut arah kebijakannya, perlu berorientasi pada pembentukan generasi muda yang mampu menghadapi perubahan zaman.

Azhari juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas perhatian terhadap pemerataan pendidikan. Ia berharap SNT 15 Buton Tengah dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan

visi Indonesia Emas 2045.

Secara historis, perluasan akses pendidikan telah menjadi bagian penting dari pembangunan Indonesia sejak awal kemerdekaan. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Amanat tersebut menjadi landasan bagi berbagai upaya memperluas kesempatan belajar di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 4, yang menargetkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Prinsip tersebut relevan dengan upaya memperkuat layanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah yang aksesnya masih menghadapi tantangan geografis.

Meski baru berjalan sekitar dua bulan, SNT 15 Buton Tengah diharapkan dapat terus mengembangkan pros-

es pembelajaran dan membangun lingkungan pendidikan yang mendukung potensi peserta didik. Antusiasme siswa yang terlihat dalam kegiatan Open House menjadi salah satu gambaran awal perkembangan sekolah, tetapi peningkatan kualitasnya tetap memerlukan proses berkelanjutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Buton Tengah Armin, perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tenggara Irene Irawati Arsanti, Koordinator USN Kampus Buton Tengah H. Mulyadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buton Tengah La Ode Amaluddin, serta para orang tua peserta didik.

Pengembangan SNT 15 Buton Tengah selanjutnya diharapkan tidak hanya memperluas kesempatan belajar, tetapi juga memperkuat kualitas pembelajaran dan daya saing generasi muda. Dengan demikian, sekolah tersebut berpeluang mengambil peran dalam pembangunan sumber daya manusia di Buton Tengah dan kawasan tengah Indonesia. (*)

Kajati Sultra dan Bupati Buton Mulai Bedah 12 Rumah Warga di Desa Kondowa



Laporan:La Harman

BUTON, BP- Sebanyak 12 unit rumah masyarakat di Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, menjadi sasaran Program Gotong Royong Bedah Rumah yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Program tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H., bersama Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., pada Kamis (8/10/2026).

Kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kajati Sultra di Kabupaten Buton. Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan perbaikan tempat tinggal sekaligus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam penyediaan hunian yang layak, aman, dan nyaman.

Mengusung tema “Bersama Membangun Rumah, Menata Masa Depan yang Lebih Baik” , program ini melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Buton.

Kajati Sultra Sugeng Riyanta menekankan bahwa penanganan rumah tidak layak huni membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat.

“Penyediaan hunian yang layak membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Semangat gotong royong menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan,” demikian inti pesan Kajati Sultra dalam kegiatan tersebut.

Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra mengapresiasi inisiatif dan dukungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui program bedah rumah tersebut. Menurutnya,

sinergi antarlembaga menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Buton.

Pelaksanaan program turut melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Sterry Fendy Andih, S.H., M.H., dan Kapolres Buton AKBP Ali Rais Ndraha, S.H., S.I.K., M.M.Tr., bersama unsur Forkopimda lainnya. Sebanyak 12 calon penerima manfaat juga hadir dalam kegiatan peletakan batu pertama itu.

Selain seremoni, kondisi rumah masing-masing calon penerima manfaat turut ditinjau sebagai bagian dari pelaksanaan program rehabilitasi. Peninjauan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat kondisi hunian yang membutuhkan perbaikan.

Secara nasional, persoalan rumah tidak layak huni telah lama menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan perumahan. Pemerintah mengembangkan berbagai skema bantuan perumahan, termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang mendorong perbaikan rumah melalui dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Pendekatan tersebut menempatkan hunian layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Dalam konteks internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 11, menekankan pentingnya mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Penyediaan hunian yang layak menjadi salah satu aspek penting dalam agenda pembangunan tersebut.

Program Gotong Royong Bedah Rumah di Desa Kondowa diharapkan membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal penerima manfaat sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Namun, keberhasilan program pada akhirnya akan ditentukan oleh penyelesaian rehabilitasi 12 rumah tersebut sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing penerima. (*)

Pemerintah Perkuat Pengawasan Obat dan Percepat Reformasi Jaminan Kesehatan



Peliput: Lisna

BOGOR, BP- Pemerintah memperkuat pengawasan obat, mengkaji pemanfaatan kratom untuk kepentingan kesehatan, serta mempercepat pembenahan sistem jaminan kesehatan nasional. Langkah tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) ke-11 yang melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPJS Kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Bogor, Selasa (6/10/2026).

Salah satu agenda utama rapat ialah memperkuat pengawasan obat-obat tertentu melalui integrasi SATUSEHAT Logistik. Sistem ini dirancang untuk menghubungkan pemantauan Kemenkes dan BPOM, mulai dari produksi hingga distribusi obat ke fasilitas pelayanan kefarmasian. Integrasi tersebut diharapkan memudahkan pemerintah mendeteksi penyimpangan sekaligus menindak penyalahgunaan obat.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan sistem terintegrasi akan memperkuat pengawasan rantai pasok obat. “Dengan SATUSEHAT Logistik, kita bisa melihat, mengontrol, mendeteksi, mengevaluasi, dan kemudian melakukan penindakan mulai dari produksi sampai distribusi obat-obat tertentu ke fasilitas pelayanan

kefarmasian,” ujarnya. Pengawasan diperketat karena penggunaan obat-obat tertentu di luar ketentuan dapat menimbulkan dampak psikotropik dan risiko penyalahgunaan, termasuk di kalangan remaja. Karena itu, pemantauan distribusi menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat sekaligus memastikan obat digunakan sesuai aturan.

KKSK juga menyepakati tindak lanjut kebijakan nasional mengenai pemanfaatan kratom sebagai bahan baku dan ekstrak untuk kepentingan kesehatan. Penyusunan kebijakan akan mempertimbangkan manfaat, risiko, keamanan, mutu, serta hasil kajian ilmiah. Pemerintah turut mendorong penelitian dan uji klinis untuk memperoleh bukti tentang keamanan dan efektivitas kratom, termasuk potensi penggunaannya sebagai analgesik serta untuk membantu mengurangi ketergantungan terhadap opiat.

Di bidang pembiayaan kesehatan, pemerintah dan BPJS Kesehatan menyiapkan pengembangan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Skema ini diharapkan mendorong peningkatan mutu pelayanan sekaligus memberikan insentif kepada klinik dan praktik dokter mandiri berdasarkan kinerja. Finalisasi sistem ditargetkan pada 6 Desember 2026, dengan besaran insentif menyesuaikan kapasitas BPJS Kesehatan.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mulai diselenggarakan pada 2014. Sebagai konteks historis, JKN merupakan salah satu program perlindungan sosial berskala nasional untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Penguatan mutu layanan primer, pengawasan obat, dan koordinasi pembiayaan menjadi bagian dari tantangan berkelanjutan dalam menjaga efektivitas sistem tersebut.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai koordinasi antarlembaga diperlukan untuk menyelesaikan persoalan yang saling berkaitan. “Ini adalah rapat koordinasi kebijakan sektor kesehatan. Kita bisa mendiskusikan hal-hal yang overlapping dan mencari jalan keluarnya bersama,” kata Budi. Ia menegaskan, pembenahan perlu dilakukan secara struktural agar tidak terus berulang setiap tahun.

Rapat itu juga mengevaluasi koordinasi antarpengelola jaminan atau Coordination of Benefit (COB). Hingga 6 Oktober 2026, sebanyak 31 perusahaan asuransi telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sedangkan 25 perusahaan telah menjalin kerja sama dengan rumah sakit. OJK berharap seluruh perusahaan asuransi kesehatan dapat memperluas kerja sama tersebut hingga akhir

2026. Deputi Komis-ioner OJK Ogi Prastomiyono menga-takan koordinasi antarpengelola jaminan diperlukan untuk membangun ekosistem asuransi kesehatan yang lebih efisien dan transparan. Kerja sama tersebut juga diharapkan mempercepat pelayanan serta memperjelas koordinasi manfaat bagi peserta yang memiliki perlindungan kesehatan dari lebih dari satu penyelenggara.

Secara internasional, penguatan tata kelo-la jaminan kesehatan sejalan dengan agen-da cakupan keseha-tan semesta (Universal Health Coverage/ UHC) yang didorong Organisasi Keseha-tan Dunia (WHO). Agenda tersebut me-nekankan akses terha-dap layanan kesehatan yang dibutuhkan tan-pa menimbulkan kes-ulitan keuangan bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, integrasi pengawasan obat, peningkatan mutu fasilitas keseha-tan tingkat pertama, dan koordinasi asu-ransi menjadi seju-mulah instrumen untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan.

Selain empat agen-da utama, KKSK menyepakati percepa-tan penyelesaian ren-cana tindak lanjut periode 2023-2025 yang masih tertun-da. Evaluasi akan dilakukan setiap dua minggu pada ting-kat teknis dan setiap bulan pada tingkat pimpinan kemente-rian/lembaga secara daring. Pemerintah berharap pola koor-dinasi berkelanjutan tersebut dapat mem-percepat penyelesa-ian persoalan lintas sektor dan member-ikan kepastian bagi keberlangsungan sistem kesehatan na-sional.(*)

Pemerintah Renovasi 8.001 Puskesmas dan Bangun 1.988 Fasilitas Baru Mulai 2027

Laporan: Ardi

DENPASAR, BP- Pemerintah menyiapkan program transformasi fasilitas kesehatan nasional selama 2027-2029 dengan merenovasi 8.001 puskesmas, membangun 1.988 puskesmas baru, serta membenahi 441 rumah sakit umum daerah (RSUD). Program berskala nasional ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat upaya pencegahan penyakit.

Wakil Menteri Kesehatan Benyam-in Paulus Octavianus menyampaikan rencana tersebut saat meresmikan UPTD Puskesmas III Denpasar Barat, Bali, Selasa (6/10/2026). Pembangunan fasilitas baru diprioritaskan di kawasan berpenduduk padat untuk mengurangi beban pelayanan dan meningkatkan pemerataan akses kese-hatan.

Menurut Benyamin, pembenahan fasilitas harus diikuti perubahan orien-tasi pelayanan. Pemerintah ingin memperkuat pencegahan penyakit melalui fasilitas kesehatan tingkat per-tama sehingga masyarakat tidak selalu bergantung pada pengobatan di rumah sakit.

“Ke depan, fokus belanja kesehatan harus bergeser dari pengobatan di ru-mah sakit menuju pencegahan di fasili-tas primer,” ujar Benyamin.

Program yang direncanakan mulai 2027 itu juga mencakup penambahan unit sinar-X bergerak (mobile X-ray) di seluruh puskesmas. Kementerian Kesehatan memprioritaskan fasilitas dengan tingkat kerusakan paling parah agar peningkatan sarana kesehatan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan penanganan segera.

Khusus di Bali, sebanyak 119 puskesmas direncanakan menjalani renovasi. Selain itu, empat puskes-mas yang mengalami kerusakan berat akan dibangun ulang, sedangkan tujuh puskesmas yang masing-masing melayani lebih dari 60.000 pen-duduk akan dipecah untuk mengu-rangi kepadatan layanan.

Benyamin mengingatkan baha-wa pengadaan peralatan medis ti-dak dapat dipisahkan dari kesiapan tenaga kesehatan. Kebutuhan ra-diografer dan dokter spesialis ha-rus diperhitungkan sejak awal agar fasilitas yang telah dimodernisasi dapat beroperasi secara optimal.

“Membeli alat kesehatan bisa cepat, tetapi mencetak tenaga me-dis seperti radiografer dan dokter spesialis membutuhkan proses,” katanya.

Di Denpasar, UPTD Puskesmas III Denpasar Barat menjadi contoh pengembangan fasilitas kesehatan yang mengedepankan kebutuhan

ibu dan anak. Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, fasili-tas tersebut dibangun melalui transformasi kawasan yang sebelumnya merupakan pasar loak dan tempat pembuangan sementara menjadi pusat pe-layanan kesehatan yang inklu-sif.

Puskesmas itu beroperasi se-lama 24 jam dan menyediakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Pelayanan tersebut ditujukan untuk menangani kegawat-daruratan obstetri dan neonatal dasar. Puskesmas juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempermudah penerbitan akta kelahiran bayi secara langsung.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Anak Agung Candrawati menambahkan, fasilitas terse-but telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan dan dilengka-pi layanan gawat darurat Den-pasar Mantap Kesehatan Mas-yarakat (Damakesmas) selama 24 jam. Integrasi itu diha-rapkan memperkuat jangkauan pelayanan bagi masyarakat.

Secara historis, penguatan puskesmas sejalan dengan arah pembangunan kesehatan dun-ia yang dirumuskan melalui Deklarasi Alma-Ata pada 1978. Deklarasi yang didukung Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF tersebut menempatkan pelayanan kese-hatan primer sebagai landasan untuk mewujudkan kesehatan bagi semua. Indonesia turut mengadopsi prinsip tersebut melalui penguatan puskesmas dan pelayanan kesehatan ber-basis masyarakat.

Komitmen internasional itu kembali ditegaskan melalui Deklarasi Astana pada 2018, yang memperkuat peran pe-layanan kesehatan primer da-lam mencapai cakupan kes-ehatan semesta dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dalam konteks terse-but, keberhasilan program In-donesia pada 2027-2029 tidak hanya ditentukan oleh jumlah fasilitas yang direnovasi atau dibangun, tetapi juga oleh pemerataan tenaga kesehatan, mutu pelayanan, dan kemam-puan masyarakat mengakses layanan secara berkelanjutan. (*)

PT FAREN GRAFIKA KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak: Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks
Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara				

KPK Temukan Rp934 Juta dalam Tong Biru di Rumah Adik Bupati Klaten



Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang tunai Rp934 juta yang disimpan dalam tong biru di kediaman Hanaku Agni Sadewo (HAS), pihak swasta yang disebut sebagai adik Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Temuan tersebut menjadi bagian dari barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2026 yang turut menyeret sejumlah pejabat dan pihak lainnya untuk diperiksa.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tong berwarna biru itu diduga digunakan untuk menampung atau menyimpan uang yang berkaitan dengan penerimaan yang sedang diselidiki penyidik. Tong tersebut diamankan bersama barang bukti lainnya dalam operasi di wilayah Klaten.

“Bahwa ember atau tong tersebut diduga yang digunakan Bupati untuk menampung atau untuk menyimpan dugaan penerimaan-penerimaan uang,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pelaksana Tugas Penyidikan KPK

Achmad Taufik Husein mengungkapkan, uang di dalam tong tersebut terdiri atas pecahan Rp100 ribu yang dibungkus plastik. Nilai keseluruhannya mencapai Rp934 juta. Uang itu ditemukan di kediaman HAS, yang disebut sebagai pihak swasta. “Senilai Rp934 juta ditemukan di kediaman HAS (Hanaku Agni Sadewo, pihak swasta), yang disimpan dalam sebuah tong berwarna biru,” ujar Taufik, Sabtu (17/10/2026).

Tong tersebut kemudian dibawa penyidik sebagai barang bukti. Wadah itu terlihat tertutup rapat dan diberi label “Dalam Pengawasan KPK”. Selain temuan Rp934 juta, penyidik juga menemukan uang dengan nilai keseluruhan yang disebut mencapai Rp1,9 miliar, meningkat dari sekitar Rp1 miliar yang sebelumnya disita.

OTT pada 15 Oktober 2026 itu menyasar Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, serta 18 orang lainnya. Dari 20 orang yang diamankan,

sembilan orang dibawa dari Klaten ke Jakarta dan seorang lainnya yang ditangkap di Jakarta turut menjalani pemeriksaan intensif.

KPK mengidentifikasi lima klaster dugaan korupsi dalam perkara tersebut. Klaster itu meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta pemberian kepada pihak BPK yang diduga berkaitan dengan pengondisian audit. Penyidik masih mendalami hubungan antara dugaan penerimaan uang, para pihak yang diperiksa, dan barang bukti yang diamankan.

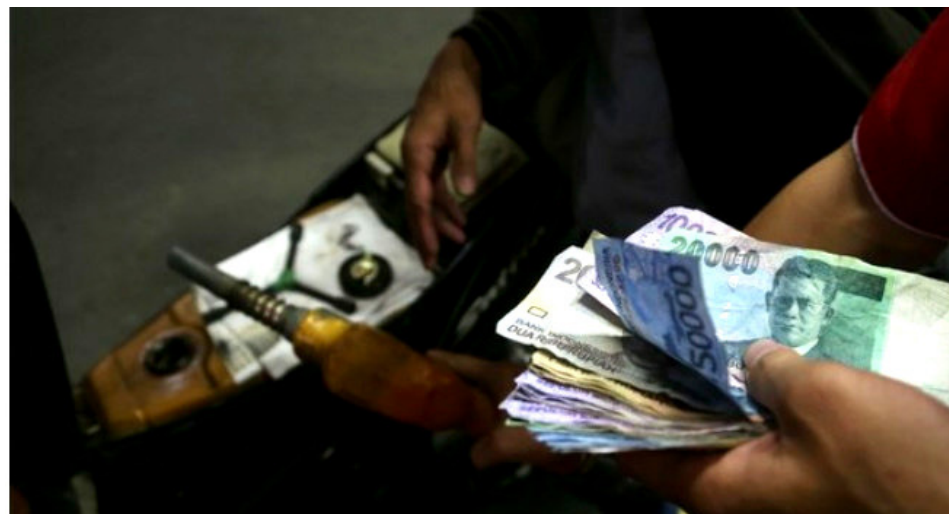
Kasus ini kembali menyoroti persoalan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan tata kelola pengawasan keuangan. Di Indonesia, pembentukan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi melalui penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, serta koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara korupsi.

Dalam konteks internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang diadopsi pada 2003, menjadi kerangka kerja global untuk mendorong pencegahan korupsi, penegakan hukum, kerja sama internasional, dan pemulihan aset. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Meski demikian, penemuan uang dan pengamanan seseorang dalam OTT tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pidana. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses hukum, berdasarkan alat bukti dan fakta yang diuji sesuai ketentuan perundang-undangan. KPK masih perlu menjelaskan perkembangan penyidikan, konstruksi perkara, serta peran masing-masing pihak berdasarkan hasil pemeriksaan. (*)

Polda Bali Amankan 21 Orang, Peralite Diduga Dijual hingga Rp200 Ribu per Liter



Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-Kepolisian Daerah Bali mengamankan 21 orang yang diduga terlibat dalam penimbunan dan penjualan kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite dengan harga mencapai Rp200 ribu per liter. Penjualan dilakukan melalui media sosial, termasuk Facebook, dengan sistem transaksi cash on delivery (COD). Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita 753 liter Peralite beserta sejumlah perlengkapan pendukung.

Pengungkapan itu melibatkan delapan polres jajaran Polda Bali. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Kombes Wisnu Prabowo menyampaikannya rincian penindakan tersebut pada Sabtu (17/10/2026).

Polresta Denpasar mengamankan lima orang, sedangkan Polres Klungkung mengamankan empat orang. Polres Jembrana, Karangasem, dan Badung masing-masing mengamankan dua orang. Adapun Polres Buleleng, Gianyar, dan Bangli masing-masing mengamankan satu orang.

Para pelaku diduga memanfaatkan media sosial untuk menawarkan Peralite dengan harga jauh di atas harga jual resmi. Transaksi dilakukan secara langsung melalui sistem COD, sehingga penyidik perlu menelusuri komunikasi dan aktivitas penjualan untuk mengetahui asal BBM serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Selain mengamankan 21 orang, polisi menyita 753 liter Peralite dan barang pendukung operasional. BBM tersebut direncanakan diserahkan kepada pihak terkait, termasuk Badan Pen-

gatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina, untuk penanganan lebih lanjut.

Wisnumenjelaskan, penyerahan barang bukti dipertimbangkan karena penyimpanan BBM yang tidak sesuai prosedur berpotensi menimbulkan risiko keselamatan. “Nanti kan kalau ini kan rawan cara penyimpanannya, nanti kan kami serahkan semua ke BPH Migas, ke Pertamina,” ujarnya.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali AKBP Chandra C. Kesuma mengatakan, penanganan terhadap orang-orang yang diamankan dibedakan berdasarkan kategori perbuatannya. Mereka yang masuk kategori perorangan berskala kecil atau baru pertama kali melakukan pelanggaran dikenai kewajiban lapor dan diminta mengikuti kegiatan sosial dengan pendampingan petugas.

“Sebagai bentuk tanggung jawab moral, para pelaku kelompok pertama juga menyatakan bersedia mengikuti kegiatan sosial didampingi petugas,” kata Chandra.

Menurut Chandra, pendekatan pembinaan tersebut mengacu pada Pasal 613 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disampaikan pihak kepolisian. Dasar hukum, klasifikasi pelanggaran, dan penerapan ketentuan tersebut dalam perkara ini perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi penyidik serta pemeriksaan terhadap peraturan yang berlaku.

Kepolisian menyatakan pendekatan tersebut dimaksudkan agar penyidik dapat memprioritaskan penindakan terhadap penimbunan BBM

berskala besar yang berpotensi merugikan masyarakat lebih luas. Orang yang kembali melakukan pelanggaran serupa dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyidik juga menelusuri bukti lain, termasuk informasi dalam telepon seluler, untuk mendalami aktivitas penjualan dan mengidentifikasi peran setiap orang. Penelusuran tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah kegiatan itu dilakukan secara individual atau melibatkan jaringan distribusi yang lebih luas.

Pengawasan distribusi BBM merupakan persoalan yang telah lama menjadi bagian dari kebijakan energi Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Pengaturan tersebut menjadi salah satu landasan tata kelola distribusi energi, termasuk upaya memastikan BBM yang memperoleh dukungan kebijakan pemerintah disalurkan sesuai ketentuan.

Di tingkat internasional, penyalahgunaan subsidi energi juga menjadi tantangan bagi pemerintah berbagai negara. Badan Energi Internasional (IEA) mencatat subsidi konsumsi bahan bakar fosil global melampaui US\$1 triliun pada 2022, ketika krisis energi mendorong pemerintah melindungi konsumen dari lonjakan harga. Meski sistem subsidi dan kondisi setiap negara berbeda, pengalaman tersebut menegaskan pentingnya pengawasan distribusi, transparansi, dan penegakan aturan untuk menjaga agar dukungan energi benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. (*)

Kadis PTSP La Ganefo Dorong Pengawasan Terpadu PBG Lintas Instansi untuk Optimalkan PAD Buton Selatan

perkuat pengawasan tersebut.

Persoalan lain yang menjadi perhatiannya ialah aktivitas pertambangan galian C. La Ganefo menilai, kegiatan yang perizinannya berada pada kewenangan pemerintah provinsi tetap perlu diawasi dari sisi dampak terhadap wilayah Buton Selatan. Ia mendorong keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup, perangkat daerah pengelola pendapatan, dan instansi terkait untuk memastikan aktivitas pertambangan tidak membahayakan lingkungan maupun masyarakat, termasuk di kawasan pesisir.

Di tengah tantangan tersebut, pelayanan perizinan PTSP Buton Selatan tetap berjalan normal meskipun sejumlah posisi jabatan masih kosong, termasuk sekretaris dan kepala bidang. La Ganefo menyebut kebutuhan masyarakat tetap dilayani melalui pembagian tugas yang tersedia. Pengurusan izin praktik bidan, apoteker, dan dokter menjadi salah satu layanan yang kerap diajukan masyarakat.

Menurut dia, permohonan dengan dokumen persyaratan lengkap dapat diproses dengan cepat, bah-

kan untuk jenis izin tertentu bisa selesai dalam satu hari. PTSP juga telah menerapkan layanan daring untuk sejumlah perizinan, seperti badan usaha dan pangkalan minyak. Sementara itu, pengurusan izin praktik tenaga kesehatan tertentu masih dilakukan secara manual karena prosesnya relatif sederhana. Penyelesaian layanan daring tetap bergantung pada kelengkapan dokumen dan respons sistem.

Secara historis, tata kelola perizinan bangunan di Indonesia mengalami perubahan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 pada 2 Februari 2021. Regulasi tersebut mengatur pelaksanaan ketentuan bangunan gedung dan menggantikan skema Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan PBG. Perubahan ini menekankan pemenuhan standar teknis bangunan, termasuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Dalam konteks internasional, laporan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan bahwa pajak properti merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi

pemerintah daerah di banyak negara. Namun, optimalisasinya membutuhkan administrasi yang memadai, basis data properti yang akurat, dan penegakan aturan yang konsisten. Pengalaman tersebut relevan sebagai konteks bagi upaya pemerintah daerah memperbaiki tata kelola pendapatan, meskipun PBG tidak dapat disamakan langsung dengan pajak properti.

La Ganefo mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan perizinan, memperpanjang izin usaha yang telah kedaluwarsa, serta mempertimbangkan dampak lingkungan dan kepentingan umum sebelum memanfaatkan lahan. Ia menegaskan, kepemilikan tanah tidak berarti pemilik dapat mengabaikan ketentuan pembangunan. Pemerintah daerah berharap kesadaran masyarakat dan pengawasan terpadu dapat memperkuat ketertiban pembangunan sekaligus mendukung peningkatan PAD Buton Selatan. (*)

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan Pemerintah Kota Baubau sepakat memperkuat sinergi serta menjajaki kerja sama antardaerah. Langkah berikutnya perlu diarahkan pada identifikasi komoditas potensial, pemetaan kebutuhan dan kapasitas pasokan, serta penyusunan mekanisme distribusi yang sesuai dengan kebutuhan kedua wilayah.

Kerja sama yang terencana diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan komoditas pangan strategis, mengurangi risiko gangguan distribusi, dan mendukung kestabilan harga di pasar. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada tindak lanjut konkret, kesesuaian pasokan dengan kebutuhan, serta koordinasi pelaksanaan antara perangkat daerah dan pelaku usaha.

Dengan memperkuat hubungan ekonomi regional, Buton Tengah dan Baubau berpeluang membangun pola kerja sama yang tidak hanya mendukung pengendalian inflasi, tetapi juga memperluas pemasaran komoditas lokal dan meningkatkan daya saing ekonomi kawasan Kepulauan Buton. (*)

Kendalikan Inflasi Pangan, Buton Tengah dan Baubau Perkuat Sinergi Antar Daerah

(14/10/2026).

Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat keterhubungan pasokan dan distribusi komoditas pangan antardaerah. Upaya tersebut dinilai penting karena perubahan ketersediaan barang, biaya distribusi, dan permintaan pasar dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat.

Penjajakan itu merupakan tindak lanjut surat Pemerintah Kota Baubau Nomor 500/5307/Setda tertanggal 8 Oktober 2026 tentang penawaran kerja sama pengembangan perekonomian dan peningkatan daya saing daerah. Melalui pembahasan tersebut, kedua pemerintah daerah berupaya mengidentifikasi peluang kolaborasi yang dapat mendukung kebutuhan pangan dan perekonomian wilayah.

Buton Tengah memiliki potensi sumber daya dan komoditas pangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Kota Baubau. Sementara itu, Baubau merupakan salah satu pusat perdagangan dan distribusi di kawasan Kepulauan Buton yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah-daerah di sekitarnya.

Keterkaitan tersebut membuat koordinasi antardaerah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang. Ketika pasokan dari daerah produsen terganggu atau distribusi mengalami hambatan, ketersediaan komoditas di pasar

tujuan dapat ikut terpengaruh dan berpotensi mendorong kenaikan harga.

Pembahasan TPID Buton Tengah juga berlangsung dalam konteks tantangan pengendalian inflasi yang telah lama menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Pengalaman nasional menunjukkan bahwa gejala harga pangan dapat memengaruhi inflasi dan kesejahteraan rumah tangga, terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang mengalokasikan bagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan pokok.

Pada tingkat global, krisis pangan dan energi pada 2007-2008 serta gangguan rantai pasok dan lonjakan harga komoditas setelah pandemi Covid-19 pada 2020-2022 memperlihatkan bahwa perubahan pasokan dan biaya distribusi dapat menekan stabilitas harga di berbagai negara. Pengalaman tersebut memperkuat pentingnya ketahanan pasokan, diversifikasi sumber pangan, dan koordinasi kebijakan untuk menghadapi gejala harga.

Di Indonesia, pengendalian inflasi daerah diperkuat melalui koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, antara lain dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID. Koordinasi tersebut mendorong penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi kebijakan, serta kerja sama antardaerah sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga.

Pertemuan di Buton Tengah dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Wujudin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Buton Tengah Jufri, serta perwakilan Dinas

ses layanan bantuan sosial dan 249 pemeriksaan kesehatan. Masyarakat juga memperoleh layanan administrasi kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD), penerbitan Kartu Pencari Kerja, serta pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Amalia mengapresiasi keterlibatan masyarakat dan kerja sama lintas sektor yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. “Kegiatan Baubau Job Fair 2026 ini berjalan dengan tertib, lancar, dan mendapat sambutan yang sangat positif,” ujarnya.

Menurut Amalia, kegiatan bursa kerja menjadi salah satu upaya

mendekatkan kesempatan kerja kepada masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap pelayanan dasar. “Capaian ini menunjukkan besarnya harapan angkatan kerja kita untuk mendapatkan peluang karier yang lebih baik, sekaligus membuktikan pentingnya mendekatkan layanan publik kepada warga,” katanya.

Secara historis, bursa kerja telah berkembang menjadi salah satu instrumen untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Di tingkat internasional, Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 88 Tahun 1948 mengatur penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan publik, termasuk

Anggota DPR RI Fraksi NasDem Ali Mazi Salurkan Rp2,49 Miliar untuk Pendidikan dan Bedah Rumah di Kabupaten Buton

mah. Penerima bantuan perumahan tersebar di sembilan wilayah, yakni Winning, Kancinaa, Saragi, Pasarwajo, Laburunci, Awainulu, Takimpo, Kondowa, dan Dongkala.

Ali Mazi, yang juga Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Tenggara dan mantan gubernur provinsi tersebut, mengatakan bantuan pendidikan dan perumahan sejalan dengan agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. “Bantuan ini merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa kita melalui pendidikan. Kemudian yang kedua, mengenai bedah rumah, bagaimana masyarakat kita bisa mendapatkan hunian yang layak,” ujarnya di sela penyerahan bantuan di Malige Daonawajo, Rumah Jabatan Bupati Buton.

Secara terperinci, bantuan PIP diberikan kepada 262 siswa SD dengan nilai Rp450.000 per siswa, 71 siswa SMP masing-masing Rp750.000, serta 22 siswa SMA masing-masing Rp1,8 juta. Sementara itu, bantuan RTLH diberikan untuk 116 rumah dengan nilai Rp20 juta per unit. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga penerima manfaat sekaligus mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak.

Ali Mazi menegaskan, dukungan bagi masyarakat tetap perlu diperjuangkan di tengah penyesuaian anggaran dan kebijakan efisiensi pemerintah. Menurut dia, perhatian terhadap pendidikan tidak semestinya berhenti pada jenjang sekolah dasar dan menengah, tetapi juga perlu menjangkau mahasiswa. Ia juga

mendorong keberlanjutan program perumahan agar lebih banyak keluarga dapat menempati rumah yang layak.

Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., mengapresiasi dukungan Ali Mazi serta komunikasi yang terjalin antara pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat. “Terima kasih atas bantuan ini yang berasal dari anggota DPR RI, Bapak H. Ali Mazi. Ini adalah hasil komunikasi dan kerja sama beliau dengan Pemda Buton serta pemerintah pusat sesuai Asta Cita Bapak Presiden,” kata Alvin. Ia berharap jumlah bantuan bagi masyarakat Buton dapat meningkat pada tahun berikutnya.

Penyerahan bantuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Buton La Ode Syamsuddin, S.Pd., M.Si., jajaran pemerintah daerah, serta masyarakat penerima manfaat. Pemerintah daerah berharap kolaborasi dengan pemerintah pusat dan wakil rakyat di DPR RI dapat terus diperkuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan perumahan.

Secara historis, Program Indonesia Pintar merupakan bagian dari upaya nasional memperluas akses pendidikan bagi anak usia sekolah, sedangkan program bantuan perumahan swadaya diarahkan untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah secara bertahap. Secara global, akses pendidikan dan hunian layak juga menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas dan Tujuan 11 tentang kota serta permukiman berkelanjutan. Penyaluran bantuan di Buton menjadi salah satu bentuk upaya daerah dalam mendukung agenda tersebut. (*)

Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Takjub, Karnaval Budaya Malam Hari Dipadati Ribuan Warga, Pemkot Benahi Pelaksanaan Tahun Depan

pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kebersamaan.

Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., yang hadir bersama Ketua TP PKK Kota Baubau Hj. Siti Aryati Yusran, Wakil Wali Kota Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., dan Sekretaris Daerah La Ode Darussalam, S.Sos., M.Si., mengaku takjub melihat antusiasme warga. Jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) juga turut meramaikan kegiatan bersama para peserta.

“Kegiatan karnaval budaya seperti ini biasanya kita laksanakan pada siang hari, tetapi kali ini kita adakan pada malam hari dan kita lihat antusiasme masyarakat sangat besar,” ujar Yusran di sela-sela kegiatan.

Sepanjang rute karnaval, peserta dari paguyuban, pelajar, komunitas seni, hingga perwakilan kecamatan menampilkan kostum adat Buton, busana etnik hasil kreasi, serta pertunjukan seni kontemporer. Sorotan lampu hias dan obor menambah semarak iring-iringan yang telah menarik perhatian warga sejak sore hari.

Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Hamsinah Bolu mengatakan, perayaan tahun ini juga ditandai dengan keterlibatan kelompok masyarakat yang menggelar kegiatan secara mandiri dan merangkainya dengan agenda hari jadi kota. Menurut dia, partisipasi tersebut memperlihatkan bahwa perayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga ruang bersama bagi warga. “Pemerintah kota tidak melaksanakan sendiri, tetapi ada partisipasi masyarakat

yang sangat luar biasa. Kami sangat berterima kasih dan insyaallah tahun depan bisa dilaksanakan lebih meriah lagi dan lebih baik,” kata Hamsinah.

Pemerintah Kota Baubau akan mengevaluasi pelaksanaan karnaval malam hari untuk menentukan perbaikan pada penyelenggaraan berikutnya. Yusran menegaskan, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus mempertahankan hal-hal yang telah berjalan baik. Pengalaman tahun ini menjadi bahan pertimbangan dalam menyiapkan perayaan yang lebih baik pada tahun mendatang.

Dalam konteks nasional, karnaval budaya telah digunakan sebagai ruang ekspresi keberagaman sekaligus sarana memperkenalkan kekayaan daerah. Pada 2015, Karnaval Kemerdekaan mulai diselenggarakan di daerah, tidak lagi berpusat di Ibu Kota, sedangkan pada 2018 Karnaval Budaya Bali digelar di Nusa Dua untuk memeriahkan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia. Di tingkat internasional, UNESCO juga mengakui festival Janknook di Bahama, yang berakar sejak awal abad ke-19, sebagai Warisan Budaya Takbenda pada 2023.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa festival dapat menjadi sarana merawat identitas budaya dan memperluas partisipasi masyarakat. Bagi Baubau, antusiasme warga dalam karnaval malam ini menjadi modal sosial untuk menjaga tradisi lokal sekaligus meningkatkan kualitas perayaan hari jadi kota pada tahun-tahun mendatang. (*)

Empat Hari Digelar, Baubau Job Fair 2026 Catat 596 Lamaran dari 528 Pencari Kerja, 551 Akses Bansos dan 249 Pemeriksaan Kesehatan, Amalia Abibu Apresiasi Partisipasi Warga

layanan bantuan sosial, kesehatan, dan administrasi publik.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Baubau, Dra. Hj. Amalia Abibu, M.Si., Jumat (16/10/2026), mengatakan tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap akses pekerjaan dan pelayanan publik yang mudah dijangkau. Baubau Job Fair 2026 resmi ditutup pada Kamis (15/10/2026), setelah berlangsung dengan melibatkan berbagai sektor pelayanan.

Di luar kegiatan rekrutmen, penyelenggara mencatat 551 ak-

Sukses Tarik Perhatian Warga, Lomba Koli-Koli dan Perahu Hias Jadi Daya Tarik Meriahkan Hari jadi Kota Baubau ke 25 Sebagai Daerah Otonom



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Sebanyak 46 peserta lomba dayung koli-koli dan 25 perahu hias memeriahkan peringatan Hari Jadi ke-485 Baubau dan 25 tahun sebagai daerah otonom di Pantai Kotamara, Senin (12/10/2026). Kegiatan yang disaksikan ribuan warga itu menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya bahari masyarakat Buton sekaligus pengembangan potensi wisata berbasis tradisi lokal.

Perlombaan yang diselenggarakan Dinas Perikanan Kota Baubau tersebut menghadirkan atraksi maritim yang berakar pada kehidupan masyarakat pesisir. Selain menjadi hiburan dalam rangkaian perayaan hari jadi, kegiatan ini dimanfaatkan untuk memperkuat identitas budaya daerah dan memperkenalkan tradisi bahari kepada generasi muda.

Kepala Dinas Perikanan Kota Baubau, Yulia Widarti, S.T., M.Si., mengatakan lomba tradisional itu bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurut dia, keberlanjutan tradisi maritim merupakan bagian penting dari upaya menjaga jati diri masyarakat pe-

sisir di tengah perubahan zaman.

“Lomba Dayung Koli-Koli dan Perahu Hias adalah bukti nyata bahwa tradisi bahari kita tetap hidup, lestari, dan terus menjadi kebanggaan bersama di tengah perkembangan zaman,” kata Yulia dalam siaran pers, Selasa (13/10/2026).

Yulia menambahkan, antusiasme masyarakat yang memadati kawasan Pantai Kotamara menunjukkan bahwa kegiatan budaya masih memiliki daya tarik kuat. Ia juga menilai perlombaan semacam ini berpotensi mendukung promosi pariwisata dan menarik kunjungan wisatawan ke Kota Baubau.

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., Ketua DPRD Kota Baubau Ardin Jufri, S.T., M.Si., Sekretaris Daerah Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos., M.Si., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Pada kategori dayung koli-koli, Rahmad meraih juara pertama, disusul Zainal di posisi kedua dan Ra-

madhan di posisi ketiga. Gunawan Guhe menempati peringkat keempat, Ajid di posisi kelima, sedangkan Muhammad Ridho meraih posisi keenam.

Sementara itu, pada kategori perahu hias, Melky Setiawan meraih juara pertama. Zulfikran menempati posisi kedua, diikuti Muhammad Said Idu di posisi ketiga. Bariu berada di peringkat keempat, Idris Ismail di posisi kelima, dan La Gani menempati posisi keenam.

Tradisi bahari yang ditampilkan dalam perlombaan tersebut memiliki kaitan dengan sejarah panjang Indonesia sebagai negara kepulauan. Sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, jalur laut berperan penting dalam perdagangan, mobilitas penduduk, dan pertukaran budaya antarpulau. Aktivitas pelayaran turut membentuk kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir di berbagai wilayah.

Di kawasan timur Indonesia, Kesultanan Buton menjadi salah satu bagian penting dari sejarah politik dan perdagangan regional. Letak Buton di antara jalur perairan Sulawesi dan Maluku menjadikan laut sebagai

unsur penting dalam kehidupan masyarakatnya. Latar sejarah ini memberi konteks bagi keberadaan tradisi maritim yang masih dipelihara masyarakat Baubau.

Pada lingkup internasional, masyarakat kepulauan Pasifik juga memiliki sejarah panjang dalam pembuatan perahu dan pelayaran antarpulau. Pengetahuan mengenai navigasi, kondisi laut, dan keterampilan membuat perahu diwariskan lintas generasi serta menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Tradisi tersebut memperlihatkan besarnya peran laut dalam membentuk peradaban masyarakat kepulauan di berbagai belahan dunia.

Melalui lomba dayung koli-koli dan perahu hias, peringatan hari jadi Baubau menjadi momentum untuk menjaga warisan budaya sekaligus mempromosikan pariwisata. Keberlanjutan tradisi ini membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat pesisir, dan generasi muda agar identitas bahari tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. (*)

DP3AKB Baubau Libatkan Forum GenRe dan PIK-R Bersihkan Pantai Kamali Sambut Hari Jadi Baubau ke-25



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Puluhan generasi muda Kota Baubau menggelar aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Kamali, Minggu (11/10/2026), untuk menyambut Hari Jadi Baubau ke-485 dan peringatan 25 tahun Kota Baubau sebagai daerah otonom. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan ruang publik.

Aksi bertajuk ‘Generasi Muda Peduli Sampah’ tersebut melibatkan anggota Forum Anak Kota Baubau, Forum Generasi Berencana (GenRe), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Ketiganya merupakan kelompok binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Baubau.

Para peserta menyisir pelataran Pantai Kamali sejak pagi. Mereka memungut sampah plastik kemasan, puntung rokok, serta berbagai jenis sampah lain yang ditemukan di area publik. Kegiatan dilakukan secara gotong royong untuk menjaga kebersihan kawasan yang menjadi salah satu ikon Kota Baubau tersebut.

Kepala DP3AKB Kota Baubau, Abdul Rahman, S.Pd., M.Si., mengatakan keterlibatan remaja dalam kegiatan lingkungan menun-

jukkan bahwa generasi muda dapat berperan aktif mendorong perubahan sosial. Menurut dia, peringatan hari jadi daerah perlu diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Pantai Kamali merupakan wajah Kota Baubau. Karena itu, menjaga kebersihan dan keindahannya menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujar Abdul Rahman dalam siaran persnya.

Ia menambahkan, momentum hari jadi kota tidak semestinya hanya dirayakan melalui kegiatan seremonial. Partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, diperlukan untuk menjaga fasilitas umum agar tetap bersih, nyaman, dan layak digunakan.

“Momentum hari jadi kota tercinta ini hendaknya tidak hanya dirayakan dengan kemeriahan, tetapi juga diisi dengan aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Kegiatan tersebut juga diharapkan mendorong warga dan pengunjung Pantai Kamali agar lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan sederhana itu dinilai penting untuk mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus mempertahankan daya tarik kawasan pesisir sebagai ruang interaksi sosial masyarakat.

Secara historis, kepedulian terhadap kebersihan lingkungan telah berkembang menjadi agenda

bersama di tingkat nasional dan internasional. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi salah satu landasan penting dalam pengelolaan sampah secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat, selain peran pemerintah.

Pada tingkat global, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2015. Salah satu sasaran yang berkaitan dengan kegiatan ini adalah Tujuan 11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan, serta Tujuan 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kedua tujuan tersebut mendorong pengelolaan lingkungan dan sumber daya secara lebih berkelanjutan.

Bagi Baubau, aksi bersih-bersih Pantai Kamali menjadi salah satu bentuk penerapan kepedulian tersebut di tingkat lokal. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama di pelataran ikon Kotamara. Melalui gerakan ini, generasi muda diharapkan terus mengambil bagian dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membangun budaya peduli sampah di tengah masyarakat. (*)